



Politisasi Islam Pada Masa Kesultanan Banten

Maftuh

maftuh@uinbanten.ac.id

Fakultas Ushuluddin dan Adab

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

• *Received:* 29.07.2022 • *Accepted:* 10.11.2022 • *Published:* 01.12.2022

Abstract: *This article focuses on the discussion of Islamic teachings that were used for political purposes during the Sultanate of Banten. The sultans of Banten, in order to perpetuate their power, often used terms taken from Islam or words derived from Arabic. Their original names were originally taken from non-Arabic languages and changed to Arabic names, such as Hasanuddin whose real name is Sabakingkin. Therefore, it is necessary to explore how the Banten kingdom adopted Islamic teachings in carrying out its government and what the further implications for the people of Banten are. As an essay that seeks to reveal past events, this paper uses the historical method whose data is obtained from library sources, among others. At the end of the discussion, this article concludes that the kingdom of Banten changed the names of non-Arab kings to Arabic names. This can be seen, for example, in the name of the founder of the Banten kingdom, Hasanuddin. Hasanuddin was originally named Prince Sabakingking. Then, royal titles also use Arabic terms, such as Maulana or Sultan. To get the title of sultan, the king sent a special envoy to Mecca with the aim of meeting with the Great Sharif. Thus, the first king to receive the title of sultan was Sultan Abdulmafakhir Mahmud 'Abdul Qadir (1596-1651), who was subsequently used by the kings after him. Sultan Abdul Qadir's real name is Prince Ratu. These royal policies which were thick with Islam, furthermore, had implications for the people of Banten. The people of Banten are known as people who are fanatical about Islam and find it more difficult to accept new things that come from outside.*

Keyword: *Politicization of Islam, Sultanate of Banten, Toponym of Banten.*

Abstrak: Artikel ini memfokuskan pembahasan mengenai ajaran Islam yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat politis pada masa Kesultanan Banten. Para sultan Banten, dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kerap menggunakan istilah-istilah yang diambil dari Islam atau kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Nama-nama asli mereka semula diambil dari bahasa bukan Arab diubah menjadi nama Arab, seperti Hasanuddin yang nama aslinya adalah Sabakingkin. Oleh karena itu perlu ditelusuri bagaimana kerajaan Banten mengadopsi ajaran Islam dalam menjalankan pemerintahannya dan apa implikasi lebih jauhnya terhadap masyarakat Banten. Sebagai sebuah tulisan yang berupaya

mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa lampau, tulisan ini menggunakan metode sejarah yang datanya diperoleh di antaranya dari sumber-sumber kepustakaan. Di akhir pembahasan, artikel ini menyimpulkan bahwa kerajaan Banten mengubah nama-nama raja yang semula non-Arab menjadi nama Arab. Hal ini misalnya terlihat pada nama pendiri kerajaan Banten yaitu Hasanuddin. Semula Hasanuddin bernama Pangeran Sabakingking. Kemudian, gelar-gelar kerajaan juga menggunakan terma-terma dari Arab, misalnya Maulana atau Sultan. Untuk mendapatkan gelar sultan tersebut, raja mengirim utusan khusus ke Mekkah dengan tujuan bertemu dengan Syarif Besar. Demikianlah, raja pertama yang mendapat gelar sultan adalah Sultan Abdulmafakhir Mahmud 'Abdul Qadir (1596-1651), yang selanjutnya gelar ini juga digunakan oleh raja-raja setelahnya. Nama asli Sultan Abdul Qadir ini adalah Pangeran Ratu. Kebijakan-kebijakan kerajaan yang kental terhadap agama Islam ini, lebih jauh, berimplikasi terhadap penduduk Banten. Masyarakat Banten dikenal sebagai penduduk yang fanatik terhadap agama Islam dan lebih sulit menerima hal-hal baru yang datang dari luar.

Kata kunci: Politisasi Islam, Kesultanan Banten, Toponim Banten

1. Pendahuluan

Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan yang terletak di ujung paling barat pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1526 ini diidentifikasi oleh para sejarawan sebagai kerajaan Islam.¹ Oleh karena itu, orang sering menyebut kerajaan ini dengan nama Kesultanan Banten.² Berdasarkan sumber sejarah, sebelum masuknya agama Islam ke tengah masyarakat, di Banten berdiri kekuasaan kerajaan Hindu-Budha dan merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Pusat pemerintahan Banten saat itu berada di Wahanten Girang (Banten Girang) yang jaraknya sekitar 13 kilometer di sebelah selatan dari Keraton Surosowan, yang merupakan pusat kesultanan Banten.

Di Wahanten Girang tersebut, raja dan masyarakat Banten diduga menganut agama Hindu Shiwa. Hal ini terbukti dengan ditemukannya patung Ganesha dan patung Shiwa di lereng Gunung Raksa, Pulau Panaitan.³ Bukti arkeologis lain yang memperkuat akan adanya agama Hindu sebelum kerajaan Islam di Banten adalah ditemukannya peninggalan arkeologis berupa jajaran/kelompok lingga di Baros (Serang), lingga di Pulau Handeuleum, lingga dan yoni di situs Sang Hyang

¹ Juladi, dkk., *Ragam Pusaka Budaya Banten* (Serang: Balai Pelestarian Peninggalan Purbajala Serang, 2005), hal. 3.

² Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, cet. ke-4 (Serang: "Saudara", 2011), hal. 73.

³ *Ibid.*, hal. 35.

Heuleut dan arca nandi di Karangantu. Pusat agama Hindu berdasarkan bukti-bukti ini adalah Wahanten Girang di bawah pemerintahan Pucuk Umum.⁴

Namun ketika Wahanten Girang berhasil dikalahkan oleh penguasa Islam, pusat kekuasaan masyarakat dipindahkan ke lokasi yang berdekatan dengan pesisir pantai. Tempat tersebut kini dikenal dengan nama Banten Lama. Di tempat inilah keraton Surosowan sebagai kediaman atau tempat tinggal raja-raja Banten berada. Pemindahan pusat ibu kota ini selain dilatarbelakangi oleh faktor politis dan ekonomi, juga atas dasar petunjuk dan nasihat yang disampaikan oleh Sunan Gunung Djati alias Syarif Hidayatullah kepada puteranya yang berkuasa di sana, Maulana Hasanuddin.⁵

Perkembangan selanjutnya, kota Banten ditata dengan penataan yang berciri khas kota Islam. Masjid-masjid didirikan, seperti Masjid Agung, Masjid Pacinan dan Masjid Kasunyatan. Kemudian, nama-nama rajanya juga memakai kata-kata yang diambil dari kosa kata yang berasal dari Bahasa Arab. Lebih jauh, hal ini secara pasti akan membawa perubahan pula pada aspek sosial keagamaan masyarakat Banten. Oleh karena itu, perlu ditelusuri jejak kesultanan Banten dalam menjalankan pemerintahannya yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Metode ini dimanfaatkan sebagai upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber, berupa data dan fakta yang dapat dipercaya (*valid*). Umumnya, untuk penggalian sejarah teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumenter.

Metode wawancara (*interview*) digunakan untuk memperoleh data atau informasi sejarah yang masih tersebar secara lisan. Sedangkan observasi digunakan untuk mengamati obyek sejarah secara langsung. Teknik observasi merupakan teknik yang dipakai untuk mengamatiinggalan sejarah atau artefak secara langsung. Artefak dapat berupa foto-foto, bangunan atau alat-alat.⁶ Lewat foto mungkin terungkap data tentang pakaian para guru dan murid masa lalu yang dapat menunjukkan perubahan gaya hidup. Demikian juga bangunan, akan dijumpai data yang bersumber pada model-model arsitektur yang diciptakan oleh tiap generasi. Sisa-sisa peninggalan yang menjadi “fosil” merupakan “wakil” dari kegiatan-kegiatan manusia pada masa lalu.⁷ Untuk memperoleh keterangan

⁴ *Ibid*, hal. 37.

⁵ Juladi, dkk., *Ragam Pusaka,*, hal. 73.

⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 46.

⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 99.

sejarah yang digali dari artefak-artefak ini, maka metode observasi merupakan salah teknik yang dapat digunakan.

Adapun teknik dokumenter maksudnya adalah teknik pengumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Menurut sejarawan, data sosial secara konseptual bisa dilihat dari ciri-ciri setiap bentuk bahan dokumenter yang berupa: autobiografi, surat-surat pribadi, catatan atau buku harian dan *memoirs*, surat kabar, dokumen pemerintah, dan cerita roman.⁸

Sumber-sumber sejarah kemudian dikaji secara kritis sehingga memperoleh data yang lebih valid. Dari semua data yang berhasil dikumpulkan, kemudian diinterpretasi. Dari hasil interpretasi, langkah terakhir yaitu menyajikannya dalam bentuk narasi historis yang dikenal dalam metode sejarah sebagai proses historiografi, yakni penulisan sejarah atau perangkaian data untuk disusun menjadi suatu narasi,⁹ sebagaimana tertulis dalam pembahasan berikut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Toponim Banten

Sebelum lebih jauh menceritakan praktik kesultanan Banten dalam memanfaatkan ajaran Islam dalam pemerintahannya, terlebih dahulu diuraikan asal muasal dari mana nama “Banten” itu berasal. Kendati hingga saat ini genealogi toponim Banten belum diketahui secara pasti, namun beberapa ahli yang mengamati Banten mencoba mengemukakannya.

Hoesein Djajadiningrat, seorang kelahiran asli Serang Banten dan doktor pertama asli bumiputera, berpendapat bahwa Banten berasal dari dua kata “*emban*” dan “*inten*”. Kata “*emban*” berarti cincin dan kata “*inten*” artinya batu permata. Sebenarnya gabungan dua kata ini telah lama digunakan, yaitu setidaknya sejak Maulana Hasanuddin memerintah Kesultanan Banten. Tradisi menyebutkan bahwa salah seorang keturunannya bernama Ratu Inten.¹⁰

Pendapat lain diajukan oleh Tubagus Ronny Nitibaskara dalam disertasinya yang mengatakan bahwa nama Banten berasal dari kata “*bantahan*”. Hal itu berkaitan erat dengan proses penyebaran ajaran agama Islam pada masa Maulana Hasanuddin. Pada waktu itu, rakyat Banten terkenal gemar membantah, dalam arti tidak mudah menerima pendapat, kehendak, atau pengaruh luar dan tidak mudah dibujuk untuk memeluk agama Islam.

⁸ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hal. 42-46.

⁹ Tendi, “Surat Janji Dan Mufakat 4 Desember 1685 : Bukti Peran Voc Dalam Memelihara Perdamaian Cirebon”, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Volume (9), Issue (1), July 2021, h. 78.

¹⁰ Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten* (Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 59.

Sehubungan dengan itu pula, ada juga yang menafsirkan kata “bantahan” sebagai *Banten-bin-tahan*, yang artinya tahan dalam perjuangan, karena orang Banten dikenal kuat saat berjuang.¹¹

Krafft, seorang ilmuwan asal Belanda, meyakini bahwa asal nama Banten adalah “batang”. Menurutnya, nama “batang” ini merujuk ke tempat pusat kerajaan yang digunakan Prabu Pucuk Umun, yaitu daerah Pasir Batang Kulon (Banten Girang). Oleh orang-orang Arab, kata “batang” sering diucapkan dengan sebutan “ba’tan”. Ucapan ini akhirnya terdengar oleh orang-orang Eropa yang datang kemudian, dan mereka melafalkannya menjadi “Bantam”.¹²

Kemudian, Francois Valentijn (1726) pernah mencari asal kata Banten yang ia temukan dalam bahasa Jawa, yaitu “bantam” yang berarti suatu tempat yang punya segala-galanya atau berkecukupan. Kata “antam” berarti ada. Tetapi J. A. van der Chijs menolak pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa kata “antam” tidak ada dalam bahasa Jawa. Namun dia mengakui bahwa memang terdapat kata “banten” atau “bebanten” yang dalam bahasa Jawa berarti seseorang yang berkorban atau menebus dosa. Akan tetapi istilah ini, menurutnya, tidak dapat diterima sebagai nama suatu tempat.¹³

Keterangan lain mengatakan bahwa nama Banten berasal dari kata “wahanten”. Nama ini disebut-sebut sebagai dari kekuasaan Pajajaran seperti yang tercatat dalam naskah *Carita Parahiyangan*. Menurut naskah yang ditulis pada tahun 1580 tersebut, nama tempat Wahanten yang dimaksud adalah Wahanten Girang atau yang sekarang dikenal dengan nama Banten Girang.¹⁴

Banten mulai dikenal oleh para pelancong dari negara-negara luar setidaknya sejak abad ke-15. Sumber lain yang berjudul *Shung Peng Hsiang Sung* (1430), menyebut Banten terletak dalam beberapa rute pelayaran. Sumber asing lain yang menyebut Banten adalah Tome Pires (1513). Walaupun Pires menyebut nama tempat tersebut sebagai “Bautan”, namun dapat dipastikan bahwa tempat yang dimaksud oleh Pires tersebut adalah Banten yang kita kenal sekarang.¹⁵

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, nama Wahanten merupakan nama yang lebih dekat dengan nama Banten. Perubahan penyebutan ini bisa

¹¹ Tb. Ronny Nitibaskara, “Reaksi Sosial terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat (Tahun 1985-1990): Studi Kasus Desa S dan A Kecamatan Sajira dan Bojonegara (Suatu Kajian Kriminologi-Antropologi)”, *Disertasi* (Jakarta: Fakultas PPs UI, 1993), hal. 119-121.

¹² A.J.C. Krafft, “Bantam” *Tijdschrift voor Economische Geographie* 19/12 (1928): 391-405.

¹³ J.A. van der Chijs, “Oud-Bantam” *Tijdschrift voor Inlandsche Taal-, Land-, en Volkenkunde* 26 (1881): 1-62.

¹⁴ H.J. De Graaf dan Th. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Cet.V (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 2003), hal. 134; Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara* (Jakarta: LP3ES, 2003), hal. 26.

¹⁵ Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 25.

jadi untuk mempersingkat pengucapan dari yang sebelumnya tiga suku kata menjadi dua suku kata. Di samping itu, perubahan nama lebih disebabkan karena perpindahan pusat pemerintahan untuk membedakan tempat yang lama ke tempat yang baru.

b. Kesultanan Banten yang Bercitra Islam

Sebelum Islam dipeluk oleh mayoritas penduduk Banten, agama yang dianut sebagian besar penduduk di sana adalah agama Hindu.¹⁶ Atau lebih tepatnya, kepercayaan yang dipeluk masyarakat Banten waktu itu disebut agama Sunda-Budha dan agama Sunda-Hindu.¹⁷ Saat itu, Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor, yakni Kerajaan Pakuan Pajajaran.¹⁸

Ketika Sunan Ampel Denta pertama kali datang ke Banten, ia mendapati banyak orang Islam di Banten. Islamisasi di Banten semakin intensif dengan kedatangan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) bersama 98 orang murid-muridnya. Karena ketinggian ilmu dan pribadinya yang menarik, perlahan-lahan Islam diterima oleh masyarakat Banten. Bahkan karena keluhuran akhlaknya itu, Bupati Banten menikahkan Syarif Hidayatullah dengan adik perempuannya, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah dua anak yang diberi nama Ratu Winahon (atau Ratu Wulung Ayu) dan Hasanuddin.¹⁹

Karena Syarif Hidayatullah dipanggil pulang ke Cirebon untuk diangkat menjadi Tumenggung menggantikan pamannya yang sudah semakin menua, maka tugas penyebaran Islam di wilayah Banten dialihkan kepada Hasanuddin. Dalam menjalankan tugasnya itu, Hasanuddin berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Sesekali bertempat di Gunung Pulosari, Gunung Karang, Gunung Lor sampai ke Pulau Panaitan di Ujung Kulon.²⁰ Menurut Sunan Gunung Jati, Gunung Pulosari merupakan wilayah Bhramana Kandali. Di atas gunung itu hidup 800 kaum ajar yang dipimpin oleh Pucuk Umun. Menurut tradisi yang sudah berakar kuat di Jawa, antara lain tercermin dalam *Serat Centini*, apabila pemimpin agama mereka memeluk agama baru, maka pengikutnya pun berduyun-duyun akan turut memeluk agama baru itu. Sebagai bukti bahwa tempat ini dahulu pusat para pendeta, terdapat dua desa

¹⁶ Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 55.

¹⁷ Nitibaskara, *Reaksi Sosial*, hal. 125.

¹⁸ Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 18; Lukman Nurhakim, *Banten dalam Perjalanan Jurnalistik*, Moh. Ali Fadillah (Ed.) (Pandeglang: Divisi Publikasi Banten Heritage, 2006), hal. 36

¹⁹ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 161; Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah*, hal. 27.

²⁰ *Ibid.*, hal. 34.

antara Gunung Pulosari dan Gunung Karang yang namanya berawalan *mandala*, yaitu Mandalawangi dan Mandalasari.²¹

Penguasa yang bertahta pada saat Hasanuddin melakukan dakwahnya tersebut adalah Prabu Pucuk Umun yang berkedudukan di Banten Girang (tiga kilometer jaraknya dari Serang ke arah selatan). Hasanuddin menggunakan cara-cara yang dikenal oleh masyarakat setempat, seperti menyabung ayam atau mengadu kesaktian. Pada saat Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun bertanding dengan cara mengadu ayam, Hasanuddin memenangkan pertandingan. Menurut tradisi, peristiwa terjadinya pertandingan tersebut pada tahun 1525. Tahta Prabu Pucuk Umun kemudian digantikan oleh Hasanuddin, dan ia tinggal di Banten Girang kurang lebih selama setahun. Diceritakan pula bahwa sesudah kemenangan Hasanuddin ini, sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau masuk Islam, melarikan diri ke Pegunungan Selatan, yang sampai sekarang dihuni oleh keturunan mereka, yaitu orang Baduy yang digolongkan sebagai “orang Hindu”. Kebiasaan orang Baduy yang acapkali berziarah ke Banten Girang sampai sekarang, dinyatakan sebagai salah satu bukti tersebut.²²

Pada tahun 1526, atas petunjuk ayahnya, Syarif Hidayatullah, pusat kekuasaan dipindahkan dari Banten Girang ke Surosowan dan Maulana Hasanuddin menjadi penguasa Islam pertama di sana. Menurut tradisi setempat, pada saat prosesi pengalihan tersebut Sunan Gunung Jati berpesan agar “Watugilang” yang terletak di muka istana tidak boleh bergeser karena pemindahan benda itu dapat menyebabkan keruntuhannya.²³

Pemilihan Surosowan sebagai ibukota kesultanan didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi Surosowan yang dekat pantai, sehingga lebih berpotensi untuk mengembangkan pelayaran dan perdagangan yang pada masa sebelumnya sudah berjalan. Pengawasan dari Surosowan terhadap berbagai kegiatan yang terjadi di wilayah perairan dan pelabuhan tentunya menjadi lebih mudah, jika dibandingkan dari daerah pedalaman. Kedatangan bermacam komoditas dari berbagai daerah dan mancanegara yang akan diperjual-belikan di Banten, lebih cepat tersebar karena para pedagang dapat langsung memperdagangkannya setiba di pelabuhan. Selain itu, ditinjau dari segi geografis, kedudukan Kesultanan Banten di tengah-tengah Teluk Banten

²¹ Claude Guillot, Lukman Nurhakim dan Sonny Wibisono, *Banten Sebelum Zaman Islam: Kajian Arkeologi di Banten Girang 932?-1526*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin dan Henri Chambert-Loir (Jakarta: Bentang, 1996), hal. 98-99.

²² Claude Guillot, *Banten: Sejarah dan Peradaban (Abad X-XVII)*, Penerj. Hendra Setiawan dkk. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hal. 33.

²³ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 35-36.

dianggap strategis bagi kapal-kapal dagang yang akan singgah di kota pelabuhan tersebut.²⁴

Selain itu juga, pemindahan tersebut tidak mustahil atas dasar pertimbangan untuk memanfaatkan jalur pelayaran ke Selat Sunda yang kian ramai karena kapal-kapal dagang Islam menghindari Selat Malaka yang dikuasai Portugis. Orang-orang Portugis, yang juga bermaksud menyebarkan agama Katolik, lebih suka berdagang dengan saudagar-saudagar yang beragama Hindu. Dengan keadaan demikian, banyak di antara para pedagang Islam dari Malaka yang menyingkir ke Aceh dan Banten, bahkan tidak sedikit pula saudagar-saudagar Malaka yang akhirnya menetap di Banten karena memiliki citra sebagai kota dengan nilai Islam yang kuat. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa unsur agama secara tidak langsung turut mempengaruhi keramaian perdagangan di Banten.²⁵

Semakin besar dan majunya daerah Banten, maka pada tahun 1552 M, Kadipaten Banten dirubah menjadi negara bagian dari Demak dengan Hasanuddin sebagai sultannya. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Banten meliputi beberapa tempat di pulau Sumatera seperti Lampung, Indrapura, Solebar dan Bengkulu.²⁶ Kemudian ke arah sebelah timur, wilayah Jayakarta dan Karawang juga terhitung sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaannya.²⁷

Dalam usahanya membangun Banten, Maulana Hasanuddin menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan.²⁸ Komoditas utama dalam perdagangan yang bersifat internasional di wilayah ini adalah lada.²⁹ Lada tidak hanya dihasilkan di Banten, melainkan dihimpun pula dari daerah-daerah, selain dari Banten sendiri, seperti dari Lampung, Jayakarta dan Bengkulu.³⁰

²⁴ Ongkodharma Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522-1684: Kajian Arkeologi Ekonomi* (Jakarta: FIB UI, 2007), hal. 30.

²⁵ *Ibid.*, hal. 31; Abd. Muthalib Sulaiman, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Banten* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Syarif Hidayatullah, 1985/1986), hal. 17-18.

²⁶ Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal*, hal. 31.

²⁷ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 241; Lubis, *Banten dalam Pergumulan...*, hal. 35.

²⁸ J.S. Furnivall, *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*, terj. Samsudin Berlian (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hal. 19.

²⁹ Uka Tjandrasasmita, "Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa", dalam Sri Sutjiatiningsih (Peny.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, edisi ke-2 (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hal. 34; Guillot, *Banten: Sejarah dan Peradaban*, hal.19; Claude Guillot, Hasan M. Ambariyanto dan Jacques Dumarcay, *The Sultanate of Banten* (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 33; Graaf dan Pigeaud, *Kerajaan Islam*, hal.137.

³⁰ Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 81; Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 35.

Dikemukakan bahwa Hasanuddin, selain membangun istana Surosowan, juga alun-alun, pasar, masjid di kawasan Pacinan, Masjid Agung dan Masjid Karangantu.³¹ Namun sebelum adanya masjid-masjid tersebut, di kampung Kasunyatan telah ada sebuah masjid, yang menurut sumber-sumber tertulis, digunakan juga sebagai tempat mempelajari ajaran agama Islam. Dengan demikian, tidaklah benar anggapan sementara orang yang mengatakan bahwa Masjid Agung adalah masjid pertama di Banten, sebab jauh sebelum berdirinya masjid tersebut, Masjid Kasunyatan telah dibangun oleh komunitas umat muslim yang terlebih dahulu datang dan mendiami tempat tersebut, yang berarti usianya lebih tua dibanding Masjid Agung Banten tersebut.³²

Namun meski begitu, Hasanuddin dapat dianggap sebagai salah seorang penyiar agama Islam di Banten dan banyak jasanya dalam mengislamkan orang-orang kafir yang berada di Banten. Sehingga pada puncak perkembangannya, Banten menjadi salah satu pusat bagi penyebaran agama Islam. Banyak orang dari luar Banten yang sengaja datang ke Banten untuk belajar ilmu-ilmu agama Islam ke berbagai tempat atau perguruan/pesantren di Banten, yang mana salah satu pesantren besarnya adalah Kasunyatan.³³ Di pesantren inilah tempat tinggal dan tempat mengajar Kyai Dukuh yang kemudian bergelar Pangeran Kasunyatan, guru dari salah seorang pembesar Banten, Pangeran Muhammad.³⁴

Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 M dan dikuburkan oleh keluarga Kesultanan Banten di samping Masjid Agung. Setelah kematiannya, Maulana Hasanuddin kemudian dikenal dengan sebutan sesuai dengan tempat pemakamannya, yaitu Sabakingking, "tempat yang penuh dengan duka-cita".³⁵

Hasanuddin telah berhasil menanamkan agama Islam dan mengubah tradisi Hindu-Budha kepada tradisi Islam. Hal ini terlihat dari pengaruh agama Islam yang tertanam ke dalam kehidupan masyarakat Banten dengan sangat dalam, baik pada masyarakat elit maupun non-elit. Sedemikian mendalam pengaruhnya sehingga gelar yang dimiliki oleh ketiga penguasa Banten pertama, Hasanuddin, Yusuf, dan Muhammad, bercorak keagamaan, yakni *maulana* di depan nama mereka. Gelar ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tuan kita.³⁶ Menurut Nina Lubis yang mengutip de Graaf mengatakan bahwa

³¹ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 36; Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal*, hal. 32.

³² Hasan Muarif Ambary, "Agama dan Masyarakat Banten" dalam Sri Sutjiatiningsih, *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, ed. ke-2 (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hal. 49.

³³ *Ibid.*

³⁴ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 163; Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 82.

³⁵ *Ibid.*, hal. 137-138; Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Medan: Madju, 1963), hal. 64-65; Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 88; Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 36.

³⁶ Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis*, hal. 208.

gelar *sultan* di Banten baru dipakai setelah tahun 1638. Sebelumnya, gelar para rajanya adalah *maulana*.³⁷

Islamisasi di wilayah Banten, berhubungan erat dengan perubahan sosial dan kultur masyarakat karena sejak adanya agama baru itu maka terdapat perubahan dalam pelbagai macam bidang kehidupan, termasuk salah satunya adalah bidang hukum. Dalam hal ini, syariat Islam yang diterapkan oleh banyak penduduk, meliputi pelbagai macam hal, mulai dari masalah keluarga dan perkawinan, hingga pembagian warisan. Dalam perkembangannya, hukum agama selalu identik dengan kondisi umat Islam karena menjadi masyarakat mayoritas.³⁸

Tidak hanya itu, demi untuk mengukuhkan dan melegitimasi kekuasaan, mereka mengutus utusan khusus ke Mekkah untuk mendapat gelar dari Syarif Besar, selain untuk mencari ulama fikih yang akan diproyeksikan sebagai pengajar agama Islam di Banten. Dengan demikian, raja pertama di Banten yang sebenarnya mendapat gelar sultan adalah Sultan Abdulmafakhir Mahmud 'Abdul Qadir (1596-1651), yang selanjutnya gelar ini juga digunakan oleh raja-raja Banten setelahnya.³⁹ Nama asli Sultan Abdul Qadir sendiri adalah Pangeran Ratu.

Pengganti Sultan Abdul Qadir adalah Sultan Ma'ali Ahmad yang bernama asli Pangeran Anom. Sultan Abulfath Abdul Fattah gelar untuk Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Dakar, putra Sultan Ageng Tirtayasa, bergelar Sultan Abunnasr Abdul Qahar. Selanjutnya, Sultan Abulfadhl Muhammad Yahya yang bernama kecil Pangeran Ratu. Setelahnya, diganti oleh Sultan Abulmahasin Muhammad Zainul Abidin yang sebelum dinobatkan bernama Pangeran Adipati. Kemudian, Sultan Abulfath Muhammad Syifa Zainul Arifin bernama asli Pangeran Abdullah. Tradisi penggunaan gelar para raja Banten dengan mengganti nama aslinya terus berlanjut hingga masa berakhirnya kesultanan Banten tersebut. Sultan terakhir Banten, yakni Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin, yang memerintah dari tahun 1809 M hingga 1813 M, dan dipaksa turun dari tahta Kesultanan Banten oleh Gubernur Jenderal Raffles

³⁷ Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 82.

³⁸ Tendi, Djoko Marihandono, dan Abdurakhman, "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No. 1 (2019 M/1440 H), h. 118.

³⁹ *Ibid.*, hal. 53-54, 196-197, 208; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1995), hal. 55-56; Bruinessen, *Kitab Kuning*, hal. 249; Lubis, *Banten dalam Pergumulan...*, hal. 43; Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 133; Taufik Abdullah, dkk., *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), hal. 84.

guna menyerahkan pemerintahannya ke pemerintahan Inggris,⁴⁰ juga bergelar sultan.

Demikianlah, ketika kerajaan masih kuat dan memiliki wilayah yang luas, para rajanya menggunakan gelar yang sederhana saja, seperti Ratu Hasanuddin, Panembahan Yusuf dan Maulana Muhammad. Akan tetapi, ketika kerajaan menjadi mundur para penguasanya mempertahankan kemegahannya pada gelar-gelar yang tinggi dan panjang-panjang, walaupun artinya sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, gelar tersebut dapat pula diinterpretasikan bahwa pengaruh Islam di Banten benar-benar sangat mendalam. Nama-nama mereka diambil dari istilah-istilah tasawuf. Mereka pun memiliki perhatian yang tinggi dalam pembangunan bidang kerohanian Islam. Oleh karena itu, tidak heran para ahli mengkategorikan kesultanan Banten sebagai kesultanan yang bercitra Islam,⁴¹ bahkan ada yang menyebut sebagai kesultanan Islam⁴² dan Kota Bandar Islam.⁴³

Pada perkembangan yang lebih jauh, pengaruh Islam di Banten sedemikian kuatnya. Para ahli mengakui peran sultan Banten dalam menumbuhkan kehidupan agama Islam. C. Snouck Hurgronje, H.J. de Graaf, Th.G.Th. Pigeaud, G.W.J. Drewes, G.F. Pijper dan Ricklefs yang mengatakan bahwa masyarakat Banten pada abad ke-19 dan ke-20 merupakan orang-orang muslim yang sadar diri akan agamanya yang berakar pada tradisi sejak masa-masa kesultanan.⁴⁴ Oleh karena itu, dapatlah pula dipahami ketika pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa mayoritas masyarakat Banten adalah pemeluk Islam yang fanatik.⁴⁵

Setelah runtuhnya kesultanan, proses pemantapan agama Islam tetap terus dilanjutkan oleh para ulama. Bahkan ulama-ulama ini menempati posisi sentral

⁴⁰ Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu*, hal. 185.

⁴¹ Edi Sedyawaty, "Kebudayaan Banten dalam Kaitannya dengan Wawasan Kebudayaan Nasional" dalam Hasan Muarif Ambary, Halwany Michrob dan Srihardiyanto, *Kabupaten Serang Menyongsong Masa Depan* (Serang: Pemda Tk. II Serang, 1994), hal. 365.

⁴² Ambary, *Agama dan Masyarakat Banten*, hal. 48.

⁴³ Halwany Michrob, "Arsitektur Kota Bandar Islam Banten Lama" dalam Sri Sutjiatiningsih (Peny.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, edisi ke-2 (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hal. 60-75. Tulisan ini dapat ditemukan juga dalam Hasan Muarif Ambary, Halwany Michrob dan Srihardiyanto, *Kabupaten Serang Menyongsong Masa Depan* (Serang: Pemda Tk. II Serang, 1994), hal. 126-144.

⁴⁴ Christiaan Snouck Hurgronje, "Ulama Jawa yang Ada di Mekah pada Akhir Abad Ke-19" dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain, *Islam Asia Tenggara*, terj. A. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 126-144; Graaf dan Pigeaud, *Kerajaan Islam*, hal. 133-142; G.W.J. Drewes, *The Admonitions of Seh Bari* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1969), hal. 11-12; G.F. Pijper, *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, Penerj. Tudjimah (Jakarta: UI-Press, 1987), hal. 80; M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Penerj. Satrio Wahono, dkk., cet. ke-2 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 180-185.

⁴⁵ Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt*, hal. 310-312, edisi Indonesia, *Pemberontakan Petani Banten...*, hal. 428-430.

dalam setiap gerakan-gerakan sosial.⁴⁶ Namun sebagai akibat kontrol Belanda yang semakin hari semakin kuat, maka muncullah dua tipe ulama di Banten. Pertama adalah penghulu, sebagai seorang pejabat negara, dan kedua adalah kyai independen. Pada masa-masa awal Islamisasi, kedua tipe ulama ini hadir secara berdampingan. Akan tetapi ketika jabatan *Fakih Najamuddin* dihapus pada tahun 1868, loyalitas masyarakat beralih kepada kyai independen.⁴⁷ Kyai yang masuk ke dalam sistem administrasi pemerintahan kolonial dengan segera kehilangan pengaruhnya di mata rakyat, dan kekuasaan mereka menjadi hampir tidak ada artinya lagi. Sebaliknya, kyai-kyai independen sangat dihormati dan disegani oleh kebanyakan penduduk serta memiliki pengaruh yang sangat besar. Menurut Sartono Kartodirdjo, kedudukan politik mereka yang relatif mandiri itu merupakan akibat dari sumber-sumber daya yang mereka peroleh, seperti pemilikan tanah, keuntungan dari usaha dagang kecil-kecilan atau meminjamkan uang, hadiah dari murid-murid atau pengikut-pengikutnya, zakat harta dan zakat fitrah.⁴⁸ Ulama-ulama independen inilah sebenarnya yang selalu menjadi penggerak dalam gerakan-gerakan sosial yang terjadi di Banten.

Jabatan penghulu, sebagaimana Mufti Ali katakan, adalah jabatan yang berada di bawah *Fakih Najamuddin*, yang merupakan pejabat keagamaan tertinggi di Residensi Banten. Tugas pejabat penghulu ini adalah mengurus masalah-masalah pernikahan, perceraian, pewarisan, kematian, pendidikan agama, masjid, mushola, marbot, modin, bilal dan hal-hal yang menyangkut masalah kegiatan agama.⁴⁹ Secara hierarkis, di bawah jabatan kepala penghulu (*hoofd* Penghulu) terdapat penghulu *landraad* (pengadilan negeri) dan penghulu kewedanaan. Berikut pejabat agama dan ulama tahun 1861-1864 di Banten:

Tabel 1
Pejabat Agama dan Ulama Banten 1861-1864

No.	Jabatan	1861	1862	1863	1864
1.	Penghulu Kepala	1	1	1	1
2.	Penghulu Landraad	4	4	4	4
3.	Penghulu Distrik	20	22	22	22
4.	Ketib	341	339	324	392
5.	Modin	1120	665	541	411

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 60, edisi Indonesia, 86; Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, hal. 98.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 70 dan 93, edisi Indonesia, *Pemberontakan Petani Banten*, hal. 110 dan 135; Craemer, *Memori Residen Banten*, hal. xxvii; G.F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 67-100; Bruinessen, *Kitab Kuning*, hal. 258.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 136-137.

⁴⁹ Mufti Ali, *Misionarisme di Banten*, hal. 27-28.

6.	Kauman/ahli masjid	947	1364	1007	2044
7.	Marbot	527	428	317	696
8.	Bilal	128	95	81	240
9.	Guru Ngaji	1190	1085	823	693
10.	Imam/ Amil/ Penghulu Desa	2045	2045	2045	1937
11.	Ulama	6	6	6	6

Sumber: Mufti Ali. (2009). *Misionarisme di Banten*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. hal. 28.

Tidak diperoleh keterangan lebih lanjut atas dasar apa pemerintah kolonial memisahkan jabatan-jabatan di atas. Kecuali jabatan penghulu kepala, *landraad* dan distrik, jabatan-jabatan lainnya merupakan hal yang problematis. Sebab terlihat dari data-data tersebut, ahli masjid dan guru ngaji misalnya, jumlah keduanya saling bertolak-belakang dalam pertumbuhannya. Begitu pun dengan jabatan-jabatan yang lainnya, terjadi keganjilan-keganjilan. Kalau tidak terjadi penambahan yang sangat besar, maka akan terjadi sebaliknya, penurunan jumlah yang juga sangat signifikan pada tiap-tiap tahunnya. Agaknya, dalam menyikapi data-data dari laporan kolonial ini, diperlukan kehati-hatian. Sebab, sebagaimana banyak orang mengatakan, tidak jarang mereka melaporkan sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri tidak menyaksikannya. Terlebih apabila hal itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama Islam, terutama pada bagian pendidikan Islamnya, mereka hampir-hampir tidak memiliki minat sama sekali untuk memerhatikan keberadaannya.⁵⁰

Menjelang akhir abad ke-19 M, sebagaimana diceritakan oleh Raden Achmad Djajadiningrat, hampir semua keluarga yang tergolong berada di Banten memberikan dukungan kepada satu atau dua anggota keluarganya untuk belajar ke Mekkah.⁵¹ Di sana para pelajar dari Banten ini memperoleh penghargaan yang tinggi, karena aktivitas intelektualnya yang menonjol.⁵² Kontak antara Banten

⁵⁰ Steenbrink, Dhofier, Sartono Kartodirdjo dan peneliti-peneliti yang lain, mengeluhkan akan sulitnya data yang akurat ketika mereka membicarakan jumlah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lihat, Steenbrink, Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 8-9; Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 33-36; Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel* ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966), hal. 155. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*, Penerj. Hasan Basari (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), hal. 222.

⁵¹ P.A. Achmad Djajadiningrat, *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat* (Jakarta: Paguyuban Keturunan P.A.Achmad Djajadiningrat, 1996), hal. 9.

⁵² Hurgronje, *Ulama Jawa*, hal. 130; Michael Charles Williams, *Communism, Religion and Revolt in Banten* (Ohio: Ohio University Center for International Studies, 1990), hal. 56.

dengan Mekkah ini, seperti telah diikuti kisahnya di atas, telah terjalin masa yang lebih jauh yakni sejak kesultanan awal, atau setidaknya semenjak abad ke-17 M.

4. Kesimpulan

Setelah menelusuri rekam jejak Kesultanan Banten diketahui bahwa corak Kesultanan Banten adalah kerajaan yang bercorak Islam. Kebijakan-kebijakan politis para sultan sangat kental diwarnai dengan istilah-istilah yang diperoleh dari agama Islam. Bahkan untuk melegitimasi kekuasaannya supaya langgeng, mereka berani mengarungi ganasnya lautan luas demi memperoleh gelar kesultanan dari Syarif Mekkah seperti halnya aktivitas yang dilakukan oleh utusan Sultan 'Abd al-Qadir (1596-1651).

Dengan demikian, Islam digunakan sebagai instrumen politik kekuasaan telah dipraktikkan sejak masa kesultanan Banten. Hal ini tidak mengherankan sebab pada masa tersebut, seorang sultan dianggap juga sebagai pemilik otoritas keagamaan Islam. Sultan yang sekaligus juga sebagai seorang da'i, yakni penyebar agama Islam. Efek lebih jauhnya, masyarakat Banten dikenal oleh para ahli sebagai penduduk yang memiliki fanatisme keislaman yang sangat tinggi. Semangat religius yang tinggi di Banten masih terasa hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dkk. (1991). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ambary, Hasan Muarif. (1997). "Agama dan Masyarakat Banten" dalam Sri Sutjiatiningasih, *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. ed. ke-2. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. (1994). Halwany Michrob dan Srihardiyanto. *Kabupaten Serang Menyongsong Masa Depan*, Serang: Pemda Tk. II Serang,
- Azra, Azyumardi. (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. cet. ke-3. Bandung: Mizan.
- Bruinessen, Martin van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Chijs, J.A. van der. (1881). "Oud-Bantam" *Tijdschrift voor Inlandsche Taal-, Land-, en Volkenkunde* 26: 1-62.
- Claude Guillot. (2008). *Banten: Sejarah dan Peradaban (Abad X-XVII)*. terj. Hendra Setiawan dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____, Lukman Nurhakim dan Sonny Wibisono. (1996). *Banten Sebelum Zaman Islam: Kajian Arkeologi di Banten Girang 932?-1526*. terj. Winarsih Partaningrat Arifin dan Henri Chambert-Loir, Jakarta: Bentang.
- Craemer, F.G. Putman. (1980). "Memori Residen Banten" dalam *Memori Serah Jabatan 1931-1934 Jawa Barat (I)*. Jakarta: ANRI.
- Dhofier, Zamahsyari. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Djajadiningrat, Hoesein. (1983). *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*. Jakarta: Djambatan.
- Drewes, G.W.J. (1969). *The Admonitions of Seh Bari*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. terj. Samsudin Berlian, Jakarta: Freedom Institute.

- Graaf, H.J. De dan Th. Pigeaud (2003). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Cet.V, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV.
- Guillot, Claude, Hasan M. Ambary dan Jacques Dumarçay. (1990). *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia.
- Hamka. 1963). *Dari Perbendaharaan Lama*,.Medan: Madju.
- Hurgronje, Christiaan Snouck (1989). "Ulama Jawa yang Ada di Mekah pada Akhir Abad Ke-19" dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain. *Islam Asia Tenggara*. terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*. terj. Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono (1966). *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel*,. S Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Krafft, A.J.C. ((1928). "Bantam" *Tijdschrift voor Economische Geographie*. 19/12: 391-405.
- Lubis, Nina H. (2003). *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES.
- Michrob, Halwany dan A. Mudjahid Chudari. (2011). *Catatan Masa Lalu Banten*. cet. ke-4. Serang: "Saudara".
- Michrob, Halwany. (1997). "Arsitektur Kota Bandar Islam Banten Lama" dalam Sri Sutjiatiningsih (Peny.). *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. edisi ke-2. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nitibaskara, Tb. Ronny. (1993). "Reaksi Sosial terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat (Tahun 1985-1990): Studi Kasus Desa S dan A Kecamatan Sajira dan Bojonegara (Suatu Kajian Kriminologi-Antropologi)". *Disertasi*, Jakarta: Fakultas PPs UI.
- Nitibaskara, Tb. Ronny. (1993). "Reaksi Sosial terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat (Tahun 1985-1990): Studi Kasus Desa S dan A Kecamatan Sajira dan Bojonegara (Suatu Kajian Kriminologi-Antropologi)". *Disertasi*, Jakarta: Fakultas PPs UI.
- Nurhakim, Lukman. (2006). *Banten dalam Perjalanan Jurnalistik*. Moh. Ali Fadillah (Ed.), Pandeglang: Divisi Publikasi Banten Heritage.

- Pijper, G.F. (1985). *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin, Jakarta: UI-Press.
- Pijper, G.F. (1987). *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*. terj. Tudjimah, Jakarta: UI-Press.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. terj. Satrio Wahono, dkk. cet. ke-2. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sedyawaty, Edi. (1994). "Kebudayaan Banten dalam Kaitannya dengan Wawasan Kebudayaan Nasional" dalam Hasan Muarif Ambary, Halwany Michrob dan Srihardiyanto, *Kabupaten Serang Menyongsong Masa Depan*, Serang: Pemda Tk. II Serang.
- Steenbrink, Karel A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. cet. ke-2. Jakarta: LP3ES.
- Sulaiman, Abd. Muthalib. (1985/1986). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Banten*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Syarif Hidayatullah.
- Tendi, Djoko Marihandono, dan Abdurakhman, "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No. 1 (2019 M/1440 H).
- Tendi, "Surat Janji Dan Mufakat 4 Desember 1685 : Bukti Peran VOC Dalam Memelihara Perdamaian Cirebon", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Volume (9), Issue (1), July 2021.
- Tjandrasasmita, Uka. (1997). "Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa". dalam Sri Sutjiatiningsih (Peny.). *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, edisi ke-2. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Untoro, Ongkodharma. (2007). *Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522-1684: Kajian Arkeologi Ekonomi*. Jakarta: FIB UI.